

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Pertanian Di Kabupaten Lampung Tengah)

Amrulloh¹, Estelee Elora Akbar², Arrohmatan³

Universitas Islam An Nur Lampung

amrullohaja1992@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the development strategies of the agricultural sector from the perspective of Islamic economics, with a case study at the Department of Agriculture in Central Lampung Regency. The agricultural sector plays a strategic role in supporting food security, creating employment opportunities, and alleviating poverty, particularly in rural areas. In Islamic economics, the development of the agricultural sector is not only viewed in terms of productivity and economic efficiency but also in terms of justice, sustainability, and the blessing (*barakah*) of the outcomes. This research uses a descriptive qualitative approach with field studies, in-depth interviews, and documentation of strategic programs implemented by the Department of Agriculture. The findings indicate that the agricultural development strategy in Central Lampung includes the provision of production facilities, the enhancement of farmers' capacities, and the strengthening of sharia-based farmer institutions. Although there are still various challenges such as access to capital and the distribution of agricultural products, Islamic economic principles—emphasizing justice, cooperation (*syirkah*), and the avoidance of *riba*—have begun to be integrated into several assistance and agricultural partnership programs. These findings highlight the importance of synergy between technical policies and Islamic values in achieving sustainable and equitable agricultural development in the region.

Keywords: Development Strategy, Agriculture, Islamic Economics, Social Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sektor pertanian dalam perspektif ekonomi Islam, dengan studi kasus pada Dinas Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Dalam ekonomi Islam, pembangunan sektor pertanian tidak hanya dipandang dari sisi produktivitas dan efisiensi ekonomi, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan hasil usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap program-program strategis yang dijalankan oleh Dinas Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pertanian di Lampung Tengah mencakup penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan kelembagaan tani berbasis syariah. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses modal dan distribusi hasil, pendekatan berbasis ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama (*syirkah*), dan penghindaran *riba* mulai diintegrasikan dalam beberapa program bantuan dan kemitraan pertanian. Temuan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan teknis dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Pertanian, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur perekonomian nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Peran sektor ini tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, dan pengendalian inflasi (Arifin, 2005). Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pertanian memiliki tantangan besar untuk terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan pemerintah (Wahditiya et al., 2024). Keterbatasan akses terhadap modal, teknologi pertanian modern, distribusi hasil pertanian yang tidak merata, serta ketergantungan terhadap cuaca merupakan beberapa faktor penghambat yang sering ditemui dalam pengembangan sektor ini (Soedarto & Ainiyah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan tepat sasaran untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut agar pertanian dapat tumbuh secara produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat materialistis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sektor pertanian (Wajdi & Lubis, 2021). Dalam pandangan Islam, aktivitas bertani adalah bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal (Ahzania, 2025). Oleh karena itu, strategi pengembangan sektor pertanian perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kerja sama (syirkah), dan penghindaran dari praktik riba serta eksploitasi.

Pengembangan sektor pertanian dalam perspektif ekonomi Islam mengharuskan adanya pemberdayaan petani, distribusi sumber daya yang adil, serta pengelolaan hasil pertanian yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga keberkahan (Aqila, 2021). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam misalnya, menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha besar dan petani kecil (Jaelani, 2014). Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor ini harus didukung oleh kebijakan yang mampu menjembatani

kesenjangan ekonomi, sekaligus menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan usaha tani secara mandiri dan berdaya saing.

Dinas Pertanian sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai program pengembangan sektor pertanian. Mulai dari penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis, hingga pembinaan kelompok tani menjadi bagian penting dari upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani (Hamid, 2018). Namun demikian, strategi yang diterapkan masih perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.

Studi ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi pengembangan pertanian dapat dikaji dan diarahkan melalui pendekatan ekonomi Islam. Dengan mengkaji program-program strategis yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana nilai-nilai Islam telah diterapkan dalam praktik pembangunan sektor pertanian, serta bagaimana tantangan dan peluangnya di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemangku kebijakan dan pelaku pertanian agar mampu menyusun strategi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, termasuk dalam pengembangan ekonomi daerah. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan pembangunan sektor pertanian tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat petani. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan duniawi, tetapi juga keselamatan ukhrawi.

Selain itu, latar belakang historis masyarakat Lampung Tengah yang sebagian besar beragama Islam dan bekerja di sektor pertanian, menjadikan pendekatan ekonomi Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai keagamaan yang sudah mengakar di masyarakat dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung program-program pembangunan, jika dikemas dalam strategi yang partisipatif dan edukatif. Oleh karena

itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat struktural dari atas ke bawah, tetapi juga kultural dari bawah ke atas (bottom-up approach).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang strategi pembangunan pertanian berbasis nilai Islam, serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku sektor pertanian. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggali dinamika kebijakan pertanian, merumuskan strategi yang berlandaskan prinsip Islam, dan mengidentifikasi hambatan serta solusi yang dapat diterapkan secara nyata di tingkat daerah. Melalui kajian ini diharapkan tercipta suatu pemahaman yang utuh bahwa pembangunan pertanian bukan semata-mata masalah teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial, dan spiritual yang perlu dikelola secara harmonis. Strategi pembangunan sektor pertanian yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam akan memberikan arah baru bagi pembangunan daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi Islam (Santoso & Madiistriyatno, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan persepsi yang mendasari kebijakan dan program-program yang diterapkan oleh Dinas Pertanian, serta sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan tersebut. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek strategi pembangunan pertanian yang mengandung nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan etika ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta pelaksanaan program pertanian oleh Dinas Pertanian. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan kunci, seperti pejabat Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, dan petani binaan, guna memperoleh informasi yang komprehensif dan valid terkait strategi yang dijalankan dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, serta data program dan anggaran Dinas Pertanian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model interaktif Miles dan Huberman. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep dalam ekonomi Islam. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan kredibel. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai strategi pembangunan pertanian berbasis syariah di Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pengembangan Pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran vital dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program strategis untuk mengembangkan sektor pertanian, yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Berdasarkan data lapangan, beberapa strategi yang telah dijalankan mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, serta dukungan terhadap kelembagaan tani. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi produksi, serta daya saing petani dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks.

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah bantuan benih dan pupuk bersubsidi bagi petani kecil. Program ini tidak hanya membantu menurunkan biaya produksi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani. Dinas Pertanian juga menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara bergiliran melalui kelompok tani, yang dinilai efektif dalam mempercepat proses pengolahan lahan dan panen. Dengan demikian, efisiensi kerja petani meningkat dan waktu produksi dapat dipangkas secara signifikan.

Selain penyediaan input produksi, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis dan penyuluhan pertanian juga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan. Materi pelatihan mencakup teknik budidaya modern, pengendalian hama, pengelolaan hasil pasca panen, hingga pemasaran digital. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis petani, tetapi juga mendorong kemandirian dan inovasi dalam mengelola usaha tani mereka secara berkelanjutan.

Dinas Pertanian juga mendorong penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan distribusi bantuan. Lebih jauh, dalam beberapa kasus, kelompok ini juga dijadikan mitra dalam penyaluran program kemitraan dengan sektor swasta, termasuk dalam pengelolaan rantai pasok hasil pertanian. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar serta akses yang lebih luas terhadap informasi dan modal.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi strategi ini, seperti keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani dalam pelatihan, serta minimnya evaluasi terhadap dampak jangka panjang program-program tersebut. Selain itu, masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelembagaan formal, sehingga belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program-program pengembangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara menyeluruh.

Dari perspektif ekonomi Islam, strategi-strategi ini memiliki nilai positif karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani dan distribusi sumber daya yang lebih adil (Yusuf, 2022). Namun, penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan teknis Dinas Pertanian. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan nilai spiritual dan etis dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian ke depan.

Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian tidak hanya membutuhkan intervensi teknis, tetapi juga pendekatan nilai-nilai yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama. Dinas Pertanian perlu berkolaborasi dengan lembaga keagamaan, akademisi, dan komunitas petani untuk merancang program-program yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Program Pertanian

Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam strategi pembangunan pertanian merupakan suatu upaya penting yang mencerminkan pendekatan spiritual dan etis dalam pengelolaan ekonomi (Damanuri & Rosyidah, 2024). Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kerja sama (*syirkah*), tanggung jawab kolektif, serta keberkahan hasil usaha mulai

diperkenalkan dalam beberapa program pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya untuk membentuk kelembagaan tani berbasis syariah dan mendorong sistem kemitraan yang adil antara petani dan pelaku pasar.

Salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip Islam adalah melalui program kemitraan berbasis keadilan, di mana petani tidak dibebani bunga (riba) dalam mendapatkan modal usaha, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau hibah produktif. Beberapa program bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga swasta mulai menggunakan skema syariah, seperti *qardhul hasan* atau sistem bagi hasil dalam pengadaan alat pertanian dan input produksi. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban petani, tetapi juga mendorong sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat tani.

Nilai kerja sama atau *syirkah* juga mulai diaplikasikan dalam pembentukan kelompok usaha tani yang mengelola hasil panen secara kolektif, baik untuk konsumsi lokal maupun pemasaran ke luar daerah. Melalui mekanisme ini, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga dibagikan secara adil kepada seluruh anggota kelompok sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama. Prinsip musyawarah dan transparansi menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan kelompok, yang sejalan dengan etika Islam dalam bermuamalah.

Namun, upaya integrasi nilai-nilai Islam ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman petani dan aparat pelaksana terhadap konsep-konsep ekonomi Islam secara praktis. Banyak program yang masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh aspek spiritualitas atau etika sosial dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum adanya regulasi atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan program berbasis syariah dalam sektor pertanian juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pertanian, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana penerapannya dalam kebijakan publik. Kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan akademisi di bidang ekonomi syariah perlu diperluas agar proses transformasi nilai ini berjalan secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, akan terbentuk paradigma baru pembangunan pertanian yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan sektor pertanian juga memiliki potensi besar dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Ketika prinsip keadilan dan keberkahan

menjadi landasan utama, maka pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor marginal, tetapi sebagai instrumen utama dalam membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai kerangka dasar dalam perumusan strategi pembangunan daerah, khususnya dalam sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas seperti pertanian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan sektor pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah telah mengarah ke penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani, namun integrasi prinsip ekonomi Islam masih perlu diperkuat. Pendekatan yang lebih menyeluruh antara aspek teknis dan nilai syariah akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mewujudkan pertanian yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan sektor pertanian yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan produktivitas, kapasitas petani, serta penguatan kelembagaan tani. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mulai mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, kerja sama (*syirkah*), penghindaran riba, dan keberkahan hasil usaha. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap prinsip syariah serta kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan, integrasi antara strategi teknokratis dan nilai-nilai etis Islam dinilai penting untuk menciptakan pembangunan pertanian yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan membawa maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan teknis dan pendekatan spiritual perlu terus ditingkatkan agar pertanian di Lampung Tengah dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam

Referensi

- Ahzania, Z. (2025). Penerapan Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Syaibani: Meningkatkan Aktivitas Produksi Etis di Industri Kreatif Indonesia. *An Tarodim: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 31–44.
- Aqila, N. (2021). *Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa*

- Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)*. IAIN Parepare.
- Arifin, B. (2005). *Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*. Grasindo.
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam dalam SDGs. *Syntax Idea*, 6(6), 2517–2534.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.
- Jaelani, D. I. (2014). Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi). *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 1(1), 18–34.
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Indigo Media.
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wahditiya, A. A., Situmorang, H., Ernanda, R., Agustia, R., Wijaya, W., Hidayati, F., Patappa, A. M., & Akbar, W. K. (2024). *Ekonomi Pertanian: Teori dan Praktik*. CV. Gita Lentera.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79.